

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Mengenai tentang perekonomian Indonesia, pada dasarnya pembangunan regional tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan pembangunan nasional salah satunya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan yang termasuk di dalamnya pemerataan antar daerah (wilayah). Untuk mencapai sasaran di atas bukanlah pekerjaan ringan karena pada umumnya pembangunan ekonomi suatu daerah berkaitan erat dengan pengembangan potensi ekonomi bahwa setiap wilayah harus bervariasi dalam sektor ekonomi dan karakteristik yang dimilikinya.

Pemerintah daerah sebagai satuan yang diberi wewenang untuk mengatur diri sendiri sesuai otonomi daerah, tentu saja membutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Namun, pemerintah pusat tidak dapat memberikan semua pembiayaan kepada daerah, maka kepada daerah dibebankan kewajiban dan wewenang untuk menggali sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri. Untuk itu pemerintah daerah harus ada dana yang selalu diharapkan masuk ke kas daerah untuk melaksanakan aktivitas pemerintah (Suparmoko,1997).

Pembangunan selalu menimbulkan dampak positif maupun negatif, oleh sebab itu sangat diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan. Paradigma mengenai pembangunan cenderung mengidentikkan pembangunan dikatakan berhasil bila pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah relatif tinggi. Pertumbuhan suatu sektor perekonomian yang terjadi di suatu wilayah akan berdampak tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, tetapi juga di wilayah lainnya yang memiliki keterkaitan ekonomi dengan wilayah tersebut.

Dengan dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No.25 Tahun 1999 yang diganti dengan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah yang menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Kedua Undang-Undang tersebut memiliki makna yang sangat penting bagi daerah, karena terjadinya pelimpahan kewenangan dan pembiayaan yang selama ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Pembangunan daerah haruslah sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabila pelaksanaan prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi kurang optimal. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan lambatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan (Arsyad, 2000).

Pembangunan ekonomi daerah yang diharapkan oleh UU No.32 Tahun 2004 adalah pembangunan ekonomi yang dicapai dengan cara memanfaatkan potensi daerah secara optimal dengan kebijakan dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kesiapan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah tidak terlepas dari potensi dan daya dukung daerah berupa Sumber Daya Alam (SDA), sarana dan prasarana, modal yang tersedia, serta kemampuan sumber daya manusia dan kewenangan pemerintah daerah yang digunakan seoptimal mungkin. Kemampuan pemerintah daerah untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan / kelemahan wilayahnya, maka semakin penting dalam menentukan kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

Menurut Schumpeter dan Hicks dalam Jhingan (2003). tujuan pokok pembangunan ekonomi adalah untuk membangun peralatan modal dalam skala yang cukup untuk

meningkatkan produktivitas di bidang pertanian, pertambangan, perkebunan, jasa-jasa dan industri, dan pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah penciptaan modal *overhead* sosial dan ekonomi. Proses pembangunan ekonomi itu sendiri tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi memerlukan berbagai usaha yang konsisten dari berbagai pihak untuk memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi umat manusia.

Pembangunan ekonomi juga dapat menumbuhkan kegiatan-kegiatan sektor lapangan usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha-usaha sektor informal pada yang ada di kabupaten dan kota tersebut khususnya pada kabupaten solok. Pada prinsipnya pembangunan ekonomi itu sendiri merupakan rangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemerataan pendapatan masyarakat dan peningkatan hubungan ekonomi regional dalam peningkatan investasi daerah sehingga dapat menggairahkan lapangan usaha dengan sektor-sektor ekonomi yang ada (arsyad, 2000).

Kegiatan pembangunan daerah dimaksudkan sebagai usaha meratakan dan menyebarkan pembangunan untuk mensesuaikan, menyeimbangkan, serta memadukan seluruh kegiatan. Pembangunan daerah haruslah dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu antar sektor.

Pendekatan makro yang meliputi penetapan sektor unggulan utama (*basic sector*) sebagai faktor pemicu utama pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB, penetapan sektor unggulan penunjang sebagai sektor yang berfungsi mendukung perkembangan dan keberlangsungan terhadap sektor unggulan utama, baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang dan penetapan sektor pendukung (*non basic sector*) sebagai sektor yang berfungsi mendorong dan memperlancar sektor unggulan tersebut.

Untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi regional serta meningkatkan kontribusinya terhadap pembentukan total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka pembangunan sektor unggulan dapat dijadikan sebagai penggerak pembangunan ekonomi. Secara umum tujuan pembangunan bidang ekonomi khususnya sektor unggulan adalah untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dengan demikian dapat tercipta stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, dan tercipta kemakmuran dan kesejahteraan yang dinikmati oleh masyarakat daerah tersebut.

Salah satu upaya untuk menjabarkan kebijaksanaan pembangunan ekonomi di tingkat daerah, maka diperlukan suatu kawasan andalan yang berorientasi untuk mengembangkan potensi daerah. Menurut Royat dalam Mudrajat Kuncoro (2002) kawasan andalan merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai penggerak perekonomian wilayah, yang mana memiliki kriteria sebagai kawasan yang cepat tumbuh dibandingkan lokasi lainnya dalam satu provinsi atau kabupaten, memiliki sektor basis dan memiliki keterkaitan ekonomi dengan daerah sekitar.

Dengan kebijakan otonomi yang dimiliki Kabupaten Pesisir Selatan harus mampu merencanakan pembangunan daerahnya dengan memanfaatkan potensi dan daya dukung pemerintah pusat dan daerah. Untuk itu laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dijadikan sebagai indikasi yang dipakai untuk mengatur pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan pembangunan ekonomi, supaya dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan Kabupaten Pesisir Selatan.

Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebuah kabupaten di Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.749,89 km² dan populasi ±420.000 jiwa. Ibu kotanya ialah Painan. Kabupaten Pesisir Selatan, sebelah utara berbatasan dengan Kota Padang, sebelah timur dengan Kabupaten Solok dan Provinsi Jambi, sebelah selatan dengan Provinsi Bengkulu dan sebelah barat dengan Samudera Indonesia. Kabupaten Pesisir Selatan terletak

di pinggir pantai, dengan garis pantai sepanjang 218 kilometer Topografinya terdiri dari dataran, gunung dan perbukitan yang merupakan perpanjangan gugusan Bukit Barisan. Berdasarkan penggunaan lahan, 45,29 persen wilayah terdiri dari hutan, termasuk kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Cagar Alam Koto XI Tarusan, dan rawa gambut.

Sebagian besar penduduk Pesisir Selatan bergantung pada sektor pertanian tanaman pangan, perikanan dan perdangan. Sementara sumber daya potensial lainnya adalah pertambangan, perkebunan dan pariwisata.

Sektor perkebunan terutama perkebunan sawit mulai berkembang pesat sejak sepuluh tahun terakhir, yang berlokasi di Kecamatan Pancung Soal, Basa Ampek Balai dan Lunang Silaut. Melibatkan beberapa investor nasional dengan pola perkebunan inti dan plasma. Sebuah industri pengota minyak sawit CPO kini sudah berdiri di Kec. Pancung Soal, dengan kapasitas produksi sebesar 4.000 ton per hari.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar), terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Bupati Pesisir Selatan, Nasrul Abit di Painan mengatakan, pada 2013 Pertumbuhan ekonomi kabupaten tersebut sebesar 5,83% lalu meningkat menjadi 5,92% pada 2014. Pada 2015 Pemerintah Kabupaten setempat menargetkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten itu mencapai 7,09%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten itu hingga kini masih didominasi oleh sektor pertanian. "Pertumbuhan ekonomi di kabupaten ini cenderung terjadi kenaikan dari tahun ke tahun, maka itu pada tahun ini pemkab kembali menaikkan menjadi 7,09% (2015)," (Republika.co.id, Painan)

Pencapaian pertumbuhan ekonomi di Pesisir Selatan sejak lima tahun terakhir seperti pada 2010 mencapai 5,5%, pada 2011 mencapai 5,6%, 2012 kembali naik menjadi 5,7% dan 2013 mencapai 5,83%. Untuk mencapai target tersebut tidak terlepas dari kerja keras semua pihak, terutama sekali satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah

kabupaten (pemkab) setempat. (Data Kabupaten Pesisir Selatan dan Sumbar dalam angka, BPS 2010-2013)

Dimana dengan adanya otonomi daerah tersebut dapat terus menimbulkan desentralisasi fiskal yang secara tidak langsung mampu mendorong peningkatan dalam belanja rutin dan belanja modal pemerintah daerah. Sehingga ketersediaan fasilitas/pelayanan public yang di butuhkan dalam rangka mendukung kegiatan investasi pun semakin meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan hal ini, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang dapat di kelola dan dikembangkan secara optimal dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam mencapai pembangunan ekonomi yang merata. Maka penulis tertarik untuk menganalisa sektor ekonomi potensial yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS SEKTOR EKONOMI BASIS DALAM PEREKONOMIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN DENGAN PENDEKATAN PDRB”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Sektor ekonomi apa sajakah yang dapat dijadikan sebagai sektor basis atau sektor unggulan dalam pembangunan perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan analisis untuk menentukan sektor-sektor apa sajakah yang dapat dijadikan sebagai sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermamfaat sebagai bahan informasi bagi penelitian sejenisnya.
2. Diharapkan hasil penelitian ini juga dapat bermamfaat sebagai bahan masukan bagi pemerintah setempat dalam menyusun suatu dokumen perencanaan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sektor-sektor ekonomi yang produktif yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan baik itu pada sektor primer, sekunder, maupun tersier yang mana hasil yang diperoleh adalah berupa sektor-sektor unggulan yang akan dikembangkan di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pengembangan perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan kedepan.

Agar pembahasan skripsi ini lebih terarah dan mencapai sasaran yang diharapkan, maka ada pembatasan penelitian sebagai berikut :

- a. Daerah penelitian yaitu Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Tahun/periode penelitian menggunakan data *time series* periode tahun 2003-2014.
- c. Variabel penelitian ini adalah pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Data yang digunakan adalah data sekunder yang di peroleh dari BPS Provinsi Sumatera Barat.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan memudahkan dalam pemahaman skripsi ini, maka disusunlah sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini berisi landasan teori yang dipakai sebagai acuan dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu juga terdapat tinjauan pustaka (bahan acuan) yang berkaitan dengan judul penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai populasi penelitian, variable-variabel penelitian dan defenisi operasional, metode pengumpulan data serta analisisnya.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini dijelaskan mengenai keadaan geografis dan jumlah penduduk di daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Pesisir Selatan, anatar lain: laju pertumbuhan dan kontribusi ekonomi, pendapatan perkapita.

BAB V PENEMUAN EMPIRIS DAN IMPLIKASI PENEMUAN

Bagian ini merupakan hasil temuan peneliti yang terdiri dari tiga sub bab yaitu temuan empiris dari penelitian, implikasi kebijakan dan keterbatasan peneliti.

BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil peneliti dan saran-saran yang konstruktif untuk dilakukan perbaikan-perbaikan dan kemungkinan solusi alternative sebagai jawaban atas munculnya sebagai permasalahan yang ada berdasarkan hasil penelitian.

